

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan Nasional merupakan pencerminan kehendak untuk terus menerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara adil dan merata, serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan negara yang maju dan demokratis berdasarkan Pancasila. Pembangunan Nasional diarahkan untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan lahir batin, termasuk terpenuhinya rasa aman, rasa tentram, dan rasa keadilan.

Menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,

Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional.

Dalam proses pembangunan nasional tersebut didahului oleh adanya suatu perencanaan yang dilakukan dengan suatu cara tertentu. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah,

dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.

Perencanaan pembangunan nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan Perencanaan Pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Perencanaan Pembangunan Nasional menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana pembangunan tahunan. Tahapan Perencanaan Pembangunan Nasional meliputi penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana, dan evaluasi pelaksanaan rencana, salah satu sektor penting pembangunan di Indonesia adalah pembangunan dibidang ekonomi yang salah satunya diwujudkan dalam bentuk pembangunan koperasi.

Koperasi sebagai organisasi telah banyak anggota masyarakat Indonesia yang mengenalnya, sebab hampir di seluruh pelosok tanah air terpampang nama koperasi. Sungguhpun demikian masih banyak anggota masyarakat dari kelompok masyarakat tertentu yang belum memahami

koperasi, hal ini disebabkan karena koperasi memiliki bermacam-macam bentuk yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya.

Di Indonesia sendiri jumlah koperasi mencapai 188 ribu sampai dengan tahun 2011 (data koperasi kemenkop 2011), seperti juga yang diungkapkan oleh menteri Negara koperasi dan UKM Syarif Hasan “Jumlah koperasi di Indonesia meningkat 5,31% dibanding tahun lalu. Data Kementerian Koperasi dan UKM menyebutkan sampai Juni 2011 total koperasi di Indonesia mencapai 186.907 unit. "Kita melihat perkembangan kinerja koperasi selama setahun ini cukup mengembirakan," kata Menteri Negara Koperasi dan UKM, Syarif Hasan, Selasa (12/7).” Dengan penjelasan dari 186.907 unit koperasi itu, memiliki 30.472 anggota dengan volume usaha sebesar Rp 97.276 triliun serta modal sendiri mencapai Rp 30,10 triliun. Dibandingkan dengan Desember 2008 angka pertumbuhan koperasi mencapai 20,6% (<http://nasional.kontan.co.id/news/jumlah-koperasi-indonesia-meningkat-531-ketimbang-tahun-lalu>. diakses 16 april 2012).

Menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 BAB I Pasal 1 tentang Perkoperasian, dikatakan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum. Koperasi dengan berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Koperasi dapat dijadikan sebagai wadah usaha bersama, sehingga setiap kelompok masyarakat dapat membentuk koperasi, misalnya kelompok anak sekolah yang merupakan kelompok strategis. Menurut Ima Suwandi (1982:2) “kelompok anak sekolah terdiri dari anak-anak sekolah umum terdiri dari siswa – siswa sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas dan anak – anak sekolah pesantren.” Kelompok anak sekolah menjadi sasaran pertama dalam usaha memberikan pengertian serta seluk beluk perkoperasian, karena kelompok ini merupakan landasan atau fondasi bagi kehidupan koperasi pada masa mendatang yang diimplementasikan melalui pendidikan.

Pendidikan merupakan suatu proses belajar yang berlangsung seumur hidup atau sepanjang hayat. Pendidikan juga merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia baik fisik mental maupun spiritual. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa dampak positif bagi masyarakat. Dampak positif perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam masyarakat adalah keinginan dan usaha masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan diri agar tidak tertinggal dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan pendidikan.

Guru dan siswa dituntut agar mempersiapkan diri lebih baik dalam menghadapi perubahan yang pesat dan terus menerus dengan banyak belajar dan hasilnya dapat diaplikasikan dalam masyarakat.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang tercantum dalam bab II pasal 3 yang berbunyi :

Pendidikan nasional yang berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada tuhan yang maha esa, berakhlak, sehat, berilmu, cakap kreatif, mandiri dan menjadi warga yang demokratis serta bertanggung jawab.

Baik pendidikan sekolah maupun luar sekolah merupakan salah satu program pemerintah dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia yang terampil dan siap memasuki dunia kerja. Pendidikan formal di sekolah merupakan salah satu jalur yang sangat penting untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, kepribadian, sikap dan kreativitas seseorang. Salah satu lembaga pendidikan yang bertujuan menghasilkan sumber daya yang berkualitas adalah sekolah menengah kejuruan (SMK).

Dalam rencana strategis pendidikan nasional pemerintah mendorong perubahan porsi jumlah SMK:SMA menjadi 70:30 persen tahun 2015 (Kedaulatan Rakyat 21 April 2012 : 20) diharapkan dapat mengurangi pengangguran. Perubahan jumlah sekolahan ini terpicu data yang diperoleh di lapangan bahwa pengangguran produktif kebanyakan adalah lulusan SMU. Pada dasarnya SMU diprogram untuk mereka yang melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi, sedangkan pembekalan *skill* (untuk SMU) bisa dikatakan tidak ada. Berbeda dengan dunia SMK,

mereka dituntut untuk menguasai *skill* serta diharapkan dapat menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. SMK dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas dari segi keterampilan kerja, maka dari itu saat ini banyak perusahaan yang membutuhkan lulusan dari SMK.

Mata diklat kewirausahaan di SMK memegang peranan yang sangat strategis dalam menanamkan sikap kewirausahaan bagi siswa, sehingga *mindset* siswa SMK berubah dari lulus dan mencari pekerjaan menjadi lulus SMK menciptakan lapangan pekerjaan atau menjadi wirausaha. Minat berwirausaha merupakan respon evaluatif terhadap aspek wirausaha, utamanya bisnis. Minat wirausaha ditandai oleh: kemauan keras untuk mencapai tujuan dan kebutuhan hidup, memiliki keyakinan kuat atas kekuatan diri, jujur dan tanggung jawab, ketahanan fisik dan mental, ketekunan dan keuletan dalam bekerja dan berusaha, pemikiran kreatif dan konstruktif, berorientasi ke masa depan, dan berani mengambil resiko, serta dengan latihan nyata.

Prestasi belajar kewirausahaan dapat merubah sikap siswa melalui berbagai contoh positif wirausahawan yang sukses saat ini dengan tetap terbuka dalam memilah informasi mengenai kendala dan kegagalan yang juga bisa terjadi. Selanjutnya persepsi siswa tetap terdorong pada sesuatu yang positif. Prestasi belajar kewirausahaan yang baik di SMK diharapkan mampu mengembangkan seluruh potensi yang ada, untuk mengembangkan keseluruhan aspek pembelajaran kewirausahaan

diharapkan menghasilkan lulusan yang tidak hanya disiapkan untuk bekerja, tetapi menjadi wirausahawan.

Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, jumlah pengangguran mencapai 2.070.000 orang, Jumlah itu bertambah sekitar 50 ribu orang dibanding angkatan kerja pada Agustus 2009 yang sebanyak 2,02 juta orang atau bertambah 18 ribu orang dibandingkan Februari 2009 sebanyak 2,05 juta orang. "Dari jumlah angkatan kerja tersebut tingkat pengangguran terbuka (TPT) di DIY hingga Februari 2010 sebesar 6,02 persen atau sebanyak 124,4 ribu orang atau bertambah 1.400 orang dibandingkan Februari 2009 yang sekitar 123 ribu orang dan naik 3.300 orang bila dibandingkan kondisi Agustus 2009 sebesar 121,1 ribu orang," ujar Kepala BPS Yogyakarta, Suharno, Senin (23/11). Menurut Suharno, dari jumlah itu pengangguran terdidik menduduki peringkat teratas di DIY yaitu pengangguran lulusan SMA dan Perguruan tinggi. "Nampaknya masih banyak lulusan perguruan tinggi yang tidak mau kembali ke daerah asal dan mencari pekerjaan di DIY sehingga pengangguran di kelompok ini cukup banyak," tambahnya (<http://www.republika.co.id/berita/breakingnews/nusantara/10/11/23/148299-pengangguran-di-yogyakarta-terus-meningkat>. diakses 20 maret 2012)

Data tersebut menunjukkan bahwa angkatan kerja terbanyak adalah dari pengangguran terdidik yaitu tingkat pendidikan sekolah menengah dan perguruan tinggi. Ini berarti menyebabkan angkatan kerja bertambah,

padahal untuk menyediakan lapangan kerja baru saat ini merupakan masalah yang sangat sulit.

SMK sebagai faktor yang mengolah input (siswa) menjadi output (calon tenaga kerja) menyelenggarakan program pendidikan yang disesuaikan dengan jenis – jenis lapangan kerja. SMK berusaha menciptakan calon tenaga kerja yang berkompetensi sesuai dengan bidang usaha dan industri masa kini sehingga nantinya lulusan SMK bisa memenuhi standar kualitas tenaga kerja yang ditetapkan oleh dunia usaha atau industri masa kini.

Sekolah menengah kejuruan (SMK) merupakan pendidikan kejuruan pada tingkat menengah di Indonesia, yang dalam penyelenggaraan dimaksudkan untuk mempersiapkan peserta didik guna memasuki dunia kerja sesuai dengan keahlian yang dimiliki. Salah satu usaha dari SMK untuk menciptakan lulusan yang berkompeten adalah melalui praktek industri. Tujuan pelaksanaan praktek industri adalah siswa dapat mengetahui dan memecahkan masalah yang dihadapi sehubungan dengan dunia kerja. Penguasaan tentang dunia kerja sangat diperlukan bagi siswa setelah lulus menghadapi dunia kerja. Tenaga kerja lulusan lembaga pendidikan baik formal maupun non formal harus siap ditempatkan dalam lapangan kerja yang sesuai dengan bidang keahlian dan jenjang pendidikannya. Perubahan yang sangat cepat di berbagai bidang mengakibatkan meningkatnya tuntutan kemampuan dan keterampilan di segala aspek kehidupan, khususnya untuk masuk pasar kerja, hal ini sangat

logis mengingat dengan semakin pesatnya perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi akan makin tinggi pula tuntutan keterampilan yang diprasyarkan. Begitu pula tenaga kerja yang telah menempati posisi pekerjaan tertentu diharapkan dapat mampu beradaptasi dengan lingkungannya serta berupaya meningkatkan kecakapan dan keterampilannya atau dengan kata lain belajar sepanjang hidupnya.

Untuk menciptakan lulusan yang siap pakai dan adaptif, siswa dilibatkan secara langsung dalam pelaksanaan praktek kerja industri, salah satunya adalah siswa terlibat langsung dalam pelaksanaan praktek kerja industri salah satunya adalah siswa langsung terlibat dalam kegiatan berwirausaha melalui koperasi. Pihak sekolah dapat memanfaatkan keberadaan koperasi sekolah dalam rangka menumbuhkan rasa tanggung jawab kepada siswa dan mampu memberikan pengalaman kerja secara langsung bagi siswa yang bisa diterapkan ketika siswa tersebut lulus dan mampu membuat usaha sendiri (wiraswasta).

Berdasarkan hasil prasurvey yang dilakukan peneliti di SMK N 1 Bantul praktek industri terdapat sub-sub unit produksi yang ada di SMK N 1 Bantul. Sub – sub unit tersebut adalah Bank Mini, Rental pengetikan, kantin kejujuran, Unit Produksi Teknik Komputer dan Jaringan, unit produksi, dan (*Bussiness Centre*) koperasi sekolah. Pemanfaatan keberadaan sub-sub produksi ini diharapkan mampu memberikan pengalaman kerja kepada siswa.

Siswa dapat belajar bagaimana cara pengelolaan yang baik. Salah satu sub unit produksi adalah koperasi sekolah yaitu koperasi yang didirikan di lingkungan sekolah yang anggotanya terdiri dari para siswa sekolah.

Keterlibatan siswa dalam pengelolaan koperasi sekolah, siswa diajarkan mengenai cara – cara untuk berwirausaha secara mandiri dengan melalui media koperasi sekolah dalam melakukan kegiatan wirausaha. Dalam mewujudkan tujuan keterlibatan siswa dalam pengelolaan koperasi sekolah, guru penanggung jawab dan guru pembimbing perlu meningkatkan pengawasan dan pengarahan kepada siswa serta adanya pelatihan mengenai bagaimana tata cara berwirausaha yang benar. Hal tersebut bertujuan untuk meminimalisir hambatan yang akan terjadi dalam pelaksanaan kegiatan berwirausaha melalui koperasi sekolah.

Peningkatan mutu dan kualitas kinerja siswa dalam berwirausaha melalui media koperasi sekolah sangat penting dalam melatih keterampilan siswa dalam melakukan kegiatan mandiri berwirausaha. Peningkatan sarana dan prasarana koperasi sekolah merupakan hal yang perlu ditingkatkan, karena untuk membantu proses pencapaian tujuan menumbuhkan dan melibatkan siswa dalam kegiatan wirausaha yang tidak lepas dari hal – hal yang ada di dalam koperasi sekolah itu sendiri. Sarana dan prasarana itu antara lain barang – barang baik itu yang merupakan barang konsumsi atau pun barang produksi yang nantinya akan dipasarkan lagi oleh siswa ke masyarakat, jika ketersediaan serta variasi barang yang

ada kurang, maka menjadi suatu kendala dalam melaksanakan kegiatan kewirausahaan, sehingga tujuan dari keterlibatan siswa dalam berwirausaha melalui media koperasi sekolah dalam rangka meningkatkan jiwa kemandirian kurang optimal.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik mengambil judul **“Pengaruh Koperasi sekolah dan Prestasi Belajar Mata Diklat Kewirausahaan terhadap Minat Berwirausaha siswa kelas XI Kompetensi keahlian Administrasi perkantoran SMK N 1 Bantul Tahun Ajaran 2011/2012”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Belum pahamnya masyarakat tentang seluk beluk perkoperasian
2. Koperasi yang kalah bersaing dengan badan usaha lainnya
3. Tingginya tingkat pengangguran di Indonesia khususnya di Yogyakarta
4. Sekolah menengah tidak memberikan skill khususnya di bidang wirausaha
5. Barang – barang yang tersedia di koperasi sekolah kurang bervariasi dan pernah juga ditemukan barang yang tidak layak masih di jual
6. Terdapat harga – harga barang di koperasi yang lebih mahal daripada harga barang di luar

7. Petugas yang berada di koperasi tidak ramah dan cenderung tidak memperhatikan pelanggan / pengunjung koperasi
8. Kurangnya minat berwirausaha dalam diri masing-masing siswa
9. Prestasi Belajar siswa yang masih rendah

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, agar permasalahan tidak meluas dan dapat dikaji lebih fokus maka penelitian ini hanya membahas tentang rendahnya minat berwirausaha siswa-siswi di SMK

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas yang telah dikemukakan maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut :

1. Adakah pengaruh koperasi sekolah terhadap minat berwirausaha siswa kelas XI kompetensi keahlian administrasi perkantoran SMK Negeri 1 Bantul
2. Adakah pengaruh prestasi belajar mata diklat kewirausahaan terhadap minat berwirausaha siswa kelas XI kompetensi keahlian administrasi perkantoran SMK Negeri 1 Bantul
3. Adakah pengaruh koperasi sekolah dan prestasi belajar mata diklat kewirausahaan terhadap minat berwirausaha siswa kelas XI kompetensi keahlian administrasi perkantoran SMK Negeri 1 Bantul.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Seberapa besar pengaruh peran koperasi sekolah terhadap minat berwirausaha siswa kelas XI kompetensi keahlian administrasi perkantoran SMK Negeri 1 Bantul
2. Seberapa besar pengaruh prestasi belajar mata diklat kewirausahaan terhadap minat berwirausaha siswa kelas XI kompetensi keahlian administrasi perkantoran SMK Negeri 1 Bantul
3. Seberapa besar pengaruh peran koperasi sekolah dan prestasi belajar mata diklat kewirausahaan terhadap minat berwirausaha siswa kelas XI kompetensi keahlian administrasi perkantoran SMK Negeri 1 Bantul.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

Sebagai pengalaman berharga untuk meningkatkan kemampuan berpikir dalam mengemukakan sesuatu dengan cara ilmiah.

b. Bagi sekolah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi sekolah dalam mata diklat kewirausahaan.

2. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran dalam mengembangkan pengetahuan mengenai peran koperasi sekolah dan prestasi belajar mata diklat kewirausahaan terhadap minat berwirausaha siswa di SMK Negeri 1 Bantul.